

**OPTIMALISASI PERAN BAGIAN KERJASAMA BIRO PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH SETDA PROV SULTENG DALAM PENDATAAN DATA
KERJASAMA DAERAH**

Marshanda Widya Adinda¹,Endang Indartuti ²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

marwidya1414@gmail.com, endangindartuti@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Kerja sama pihak regional dan ketiga adalah kebutuhan strategis untuk mendukung pengembangan dan optimalisasi layanan publik yang dipercepat. Tujuan dari layanan nirlaba adalah untuk mengoptimalkan peran lembaga pemerintah dalam sistem pengumpulan data regional dan otonomi lokal. Kegiatan ini dilakukan selama 30 hari dengan pengamatan, wawancara dan partisipasi aktif selama magang di bagian Sulawesi. Data dikumpulkan dari dokumen resmi, laporan kerja sama dan interaksi langsung dengan karyawan terkait. Metode ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kemungkinan alur kerja, hambatan dan pengembangan sistem kerja sama regional. Hasilnya menunjukkan bahwa struktur organisasi mendukung implementasi fitur negara, tetapi ada kebutuhan untuk meningkatkan integrasi kapasitas SDM dan teknologi digital. Penggunaan sistem informasi terintegrasi dan peningkatan koordinasi antar perangkat lokal penting untuk memfasilitasi pengumpulan kerja sama. Pengalaman magang juga memiliki dampak positif pada pengembangan keterampilan lembut dan tinggi peserta. Singkatnya, mengoptimalkan sistem kerja sama regional membutuhkan penggunaan sinergi dan teknologi kelembagaan. Upaya berkelanjutan dan upaya intensif diperlukan untuk memperkuat kemampuan kami.

Kata Kunci : Biro pemerintahan,otonomi daerah,pendataan data

ABSTRACT

Regional and third party cooperation is a strategic need to support the accelerated development and optimization of public services. The purpose of the non-profit service is to optimize the role of government institutions in the regional data collection system and local autonomy. This activity was carried out for 30 days with observation, interviews and active participation during the internship in the Sulawesi section. Data were collected from official documents, cooperation reports and direct interactions with related employees. This method provides a comprehensive understanding of the potential workflow, obstacles and development of the regional cooperation system. The results show that the organizational structure supports the implementation of country features, but there is a need to improve the integration of HR capacity and digital technology. The use of integrated information systems and increased coordination between local devices are important to facilitate the collection of cooperation. The internship experience also had a positive impact on the development of participants' soft and high skills. In short, optimizing the regional cooperation system requires the use of institutional synergies and technology. Continuous efforts and intensive efforts are needed to strengthen our capabilities.

Keywords: Government bureau, regional autonomy, data collectio

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi. Tuntutan organisasi untuk memperoleh, mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas mendesak sesuai dengan dinamika lingkungan yang selalu berubah. Perubahan perlu mendapat dukungan pimpinan puncak sebagai langkah pertama yang penting untuk dilakukan bukan hanya sekedar lip servicesaja. Sumber daya manusia mengandung tugas untuk mendayagunakan potensi yang dimiliki oleh suatu lembaga secara optimal, sehingga sumber daya manusia dapat bekerja secara maksimal untuk bersama-sama mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi

organisasi. Mewujudkan tercapainya visi dan misi suatu organisasi atau instansi, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kinerja yang baik maka perlu meningkatkan kinerja pegawainya dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia, disiplin dan kerjasama tanpa mengabaikan hal-hal penting yang mendukung sumber daya manusia mampu menjadi penentu keberhasilan organisasi. Wilson (2018:211) sumber daya manusia menjadi penentu keberhasilan organisasi dengan menggunakan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki secara berkualitas.

Selama periode otonomi dan globalisasi regional, kerja sama antar -regional, periode antara pemerintah daerah dan pihak ketiga adalah kebutuhan strategis untuk mendukung pengembangan yang dipercepat, memperluas ruang lingkup layanan publik, dan mengoptimalkan kemungkinan lokal. Kerjasama regional merupakan alat penting untuk mewujudkan pemerintah yang efektif, efisien, dan berorientasi dalam meningkatkan sumur masyarakat.

Kerja sama antar daerah maupun dengan pihak ketiga menjadi kebutuhan strategis untuk mendukung percepatan pembangunan, memperluas pelayanan publik publik, dan mengoptimalkan potensi daerah. Kerja sama daerah merupakan sarana penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Peran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, khususnya Bagian Kerja Sama Setda, menjadi sangat penting dalam mendukung terwujudnya sistem pendataan kerja sama daerah yang baik. Optomalisasi peran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah ini menjadi langkah strategis untuk memperbaiki sistem pengelolaan kerja sama daerah, meningkatkan akurasi informasi, dan memperkuat pengelolaan kerja sama secara keseluruhan.

METODE PELAKSANAAN

Metode implementasi dalam kegiatan magang diimplementasikan oleh penulis melalui pendekatan kualitatif deskriptif, terutama dengan memprioritaskan pengamatan langsung kegiatan di bidang kerja sama. Kegiatan magang termasuk dalam bentuk layanan masyarakat dengan partisipasi aktif oleh siswa untuk mendukung tugas administrasi pemerintah. Magang dilakukan bekerja sama antara pemerintah dan otoritas kota setempat dari 30 hingga 30 hari kerja dari 30 Januari hingga 13 Maret 2025. Kelompok sasaran untuk kegiatan ini adalah peralatan sipil negara (ASN), mitra yang bekerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah kerja sama regional dan pihak -pihak yang terlibat dalam akuisisi data. Populasi kegiatan ini mencakup semua kegiatan kolaboratif yang dilakukan selama periode magang, tetapi sampel secara sengaja dipilih dengan memilih dokumen, kegiatan, dan proses kerja yang relevan dan aktif dalam magang. Teknik perekaman data dilakukan melalui pengamatan langsung, wawancara informal, studi dokumentasi (file PKS, mou, surat masuk/keluar) dan partisipasi dalam implementasi kegiatan. Penulis juga mencatat bidang sebagai bentuk aktivitas harian melalui buku catatan. Analisis data dilakukan dengan secara sistematis menggambarkan hasil dan pengalaman lapangan untuk mengenali peran dan proses mengoptimalkan bagian kerja sama dalam pengumpulan data kolaborasi. Data disajikan dalam bentuk cerita deskriptif dengan tabel aktivitas mingguan dan dokumen aktivitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan bersama mitra instansi pemerintah, yaitu Bagian Kerja Sama, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Mitra ini memiliki karakteristik sebagai unit pelaksana teknis yang berperan strategis dalam menjembatani hubungan kerja sama antar wilayah serta kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha dan sektor non-pemerintah. Kegiatan kerja sama yang dikelola mencakup proses administrasi, penyusunan dokumen formal, serta pemantauan implementasi dan evaluasi kebijakan daerah yang berbasis kolaborasi.

Selama pelaksanaan magang, partisipasi penulis mencerminkan kontribusi dalam penguatan tata kelola administrasi publik. Kegiatan seperti pengelolaan media sosial mendukung keterbukaan informasi publik dan pentingnya penyampaian aktivitas birokrasi secara transparan kepada masyarakat. Selain itu,

keterlibatan dalam perencanaan dan rekap sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah mencerminkan praktik koordinatif yang mendukung efektivitas perencanaan makro secara nasional. Penugasan dalam desain media pendukung serta pemrosesan dokumen kerja sama menunjukkan bahwa visualisasi dan format dokumen yang tepat mendukung efisiensi birokrasi dan penguatan identitas institusi. Kontribusi dalam penyusunan laporan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk bantuan ibadah haji menandai penerapan prinsip pelayanan publik yang inklusif. Adapun keterlibatan dalam dokumentasi kesepakatan antara pemerintah daerah dengan unit penyelenggara bandara memperlihatkan bahwa sinergi antar-sektor (pemerintah dan transportasi udara) menjadi bagian dari strategi pembangunan pariwisata daerah yang terintegrasi.

Jika dibandingkan dengan hasil pengabdian kepada masyarakat lain yang berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat secara langsung (seperti pelatihan di desa atau pendampingan UMKM), kegiatan ini menekankan kontribusi mahasiswa dalam proses administratif, evaluatif, dan dokumentatif. Meskipun dampaknya tidak langsung pada masyarakat luas, namun kontribusi ini bersifat fundamental bagi efektivitas kebijakan publik. Berdasarkan teori pelayanan publik baru (New Public Service), keterlibatan aktor non-pemerintah, termasuk mahasiswa magang, dapat memperkuat dimensi partisipatif dan transparansi dalam administrasi pemerintahan.



Gambar 1 Kegiatan Rapat Pembahasan PKS

Laporan PKS mengenai biaya bantuan penyelenggaraan ibadah haji di daerah Sulawesi Tengah. Selama masa magang, penulis berperan dalam membantu proses penyusunan Laporan Perjanjian Kerja (PKS) mengenai biaya bantuan penyelenggaraan ibadah haji antara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini meliputi pengumpulan dan verifikasi data anggaran bantuan dari pemerintah daerah, pengklasifikasian jenis belanja yang didukung, serta penyesuaian format laporan agar sesuai dengan pedoman perjanjian kerja sama. Penulis juga mendukung penyusunan ringkasan yang memuat besaran bantuan, sumber dana, serta bentuk kontribusi daerah dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan magang yang telah dilakukan selama 30 hari di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah khususnya pada bagian setda kerja sama otonomi daerah, penulis dapat menyelesaikan seluruh kegiatan magang yang diberikan oleh instansi dengan menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Kegiatan magang ini memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi

penulis, karena dapat mengasah kemampuan softskill seperti komunikasi, kedisiplinan, dan tanggung jawab, serta hardskil. Struktur organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dirancang untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintah secara efektif dan efisien. Untuk mendukung optimalisasi pendataan kerja sama daerah, sangat disarankan agar Bagian Kerja Sama Setda Provinsi Sulawesi Tengah tidak hanya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkelanjutan, tetapi juga mulai memanfaatkan teknologi digital secara maksimal melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi. Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah juga perlu dilakukan secara lebih intensif agar alur informasi menjadi lebih lancar dan menyeluruh. Untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama akan lebih mengoptimalkan fungsi perencanaan anggaran dan pengendalian internal serta meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, M. (n.d.). *PENGARUH PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, DISIPLIN DAN KERJASAMA APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP KINERJA PADA BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SULAWESI BARAT* Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar 2 Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar 3 Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar. <https://nobel.ac.id/index.php/jpmi>

Nugroho, A. A., Letari Hadiyati, T., Semarang, F. U., Pawiyatan, J., Bendan, L., & Semarang, D. (2021). Evaluasi Perencanaan Dan Evaluasi Program Pada Biro Pemerintahan OTDA Dan Kerjasama. *Jurnal Media Administrasi*, 6(1), 55–66.

SOTK-ORGANISASI-SETWAN-DLL. (n.d.).